

**ANALISA PENGARUH TRANSPARANSI DANA DESA
TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA
PELAYANAN PUBLIK DESA BULUMARGI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

Wiwin Anggraeni

NIM : 24072011



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM LAMONGAN**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik di Desa Bulumargi, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian berjumlah 89 orang dan diperoleh sampel sebanyak 47 responden dengan teknik simple random sampling menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan SIPDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat ($t = 3,380$; $\text{sig.} = 0,002 < 0,05$). Sebaliknya, transparansi pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat ($t = 1,798$; $\text{sig.} = 0,079 > 0,05$). Namun, secara simultan penerapan SIPDD dan transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat ($F = 21,193$; $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,491. Hal ini berarti bahwa 49,1% variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan dana desa menjadi faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dibandingkan transparansi semata. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi serta peningkatan kualitas implementasi teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Kata Kunci: SIPDD, transparansi dana desa, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem informasi desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi dan reformasi birokrasi, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara akuntabel, efisien, dan transparan. Dana Desa yang digelontorkan tiap tahun oleh pemerintah pusat merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan pembangunan desa serta Pelayanan Publik kepada masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Dana Desa secara langsung ke rekening desa, bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Kementerian Desa, 2019).

Besarnya dana desa yang digelontorkan tiap tahun telah memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial desa. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam hal pengelolaan, pelaporan dan pengawasan dana tersebut. Banyak kasus penyalahgunaan anggaran, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi catatan penting dalam evaluasi implementasi dana desa di berbagai daerah (Malauna dan Suryanto, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan awal pemberian dana desa dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan Sistem

Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) atau system serupa, seperti Siskeudes, yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. SIPDD merupakan sistem berbasis digital yang membantu perangkat desa dalam Menyusun anggaran, mencatat transaksi keuangan, melakukan pelaporan kegiatan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan tepat waktu (Prasetyo & Nugroho, 2020). Sistem ini diharapkan mampu mendukung prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Dalam konteks ini, SIPDD tidak hanya diposisikan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan *good governance* di tingkat lokal. Ketika pengelolaan keuangan desa terdigitalisasi dan mudah diakses, maka peluang untuk terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir. Lebih jauh, sistem informasi juga memungkinkan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan desa serta memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa (Fitriana et al., 2021). Dengan demikian, kehadiran SIPDD dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas tata kelola desa.

Meskipun demikian, implementasi sistem informasi ini tidak lepas dari kendala. Di berbagai desa, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta minimnya pendampingan teknis menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan SIPDD (Susanto & Wahyuni, 2022). Kondisi ini memengaruhi tingkat transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat serta

berdampak pada persepsi warga terhadap kinerja pemerintah desa, terutama dalam hal pelayanan publik.

Pelayanan publik di desa merupakan wajah nyata dari kinerja pemerintahan desa. Masyarakat menilai sejauh mana dana desa digunakan secara efektif salah satunya melalui kualitas layanan yang mereka terima, baik dalam administrasi kependudukan, bantuan sosial, pembangunan fisik, maupun program pemberdayaan ekonomi. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sebaliknya pelayanan yang buruk akan menimbulkan ketidakpuasan, apatisme, bahkan potensi konflik sosial (Handayani & Hidayat, 2021).

Desa Bulumargi, sebagai salah satu desa di Kabupaten Lamongan, menjadi objek penting dalam penelitian ini. Desa ini telah menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan desanya, namun belum banyak kajian yang menggali efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan transparansi dan kepuasan masyarakat. Apakah penerapan SIPDD di Desa Bulumargi benar-benar berdampak signifikan terhadap keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik, Atau justru sistem ini hanya bersifat administratif dan belum menyentuh kepentingan warga secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan fokus pada dua variabel utama: transparansi pengelolaan dana desa dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengukur sejauh mana penerapan SIPDD

memengaruhi kedua aspek tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya di Desa Bulumargi.

Selain kontribusi praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dan instansi pembina desa, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi administrasi publik dan teknologi pemerintahan desa. Masih terbatasnya penelitian yang mengaitkan sistem informasi dana desa dengan kepuasan masyarakat menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang signifikan, terutama dalam konteks desa-desa di Indonesia yang sedang bertransformasi menuju tata kelola digital.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa terhadap Transparansi dan Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik di Desa Bulumargi.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara teknologi informasi, transparansi, dan pelayanan publik di level pemerintahan desa, serta mendorong pembentukan tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi?

2. Apakah penerapan SIPDD dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Desa Bulumargi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi.
2. Mengetahui pengaruh penerapan SIPDD terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Desa Bulumargi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian mengenai penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur akademik terkait pengaruh sistem informasi terhadap transparansi dan kepuasan masyarakat dalam konteks pemerintahan desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa Bulumargi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD), sekaligus

memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Desa Bulumargi

Dengan meningkatnya transparansi dan efisiensi pelayanan publik, masyarakat akan lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Bagi Instansi Pemerintah Terkait (Dinas PMD, BPKP, dan lainnya)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem informasi keuangan desa yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar untuk studi lanjutan yang ingin mengkaji topik serupa di desa atau wilayah lainnya, baik dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun *miXI-method*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

a. Teori Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang menekankan keterbukaan informasi dan aksesibilitas data public bagi masyarakat. Menurut Hood (2006), transparansi adalah suatu kondisi di mana proses administrasi dan kebijakan dapat dilihat, dipantau dan dipahami oleh publik. Pendapat ini menegaskan pentingnya keterbukaan sebagai alat pengawasan.

Menurut Armstrong (2005), mengemukakan bahwa transparansi adalah hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Semestera itu, menurut Setyaningrum (2017), menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, program dan penggunaan anggran kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Menurut Nurmandi dan Maulani (2020), transparansi juga dapat dilihat sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga. Dalam konteks desa, transparansi berkaitan dengan seberapa terbuka pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa, perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa transparansi adalah suatu proses keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan kepada publik secara jujur, terbuka, mudah diakses, dan dipahami, guna menciptakan akuntabilitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

1. Tujuan Transparansi

Tujuan utama dari transparansi adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuan spesifiknya menurut Setyaningrum (2017), antara lain:

- a) Memberikan akses informasi kepada public secara luas;
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;
- c) Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik;
- e) Membangun kepercayaan public terhadap institusi pemerintahan.

2. Manfaat Transparansi

Transparansi memberikan manfaat strategis bagi pemerintahan dan masyarakat. Menurut UNDP (2017), beberapa manfaat transparansi antara lain:

- a) Mendorong praktik administrasi yang akuntabel;
- b) ,mengurangi ruang gelap dalam pengelolaan keuangan publik;

- c) Menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap penggunaan anggaran;
- d) Meningkatkan legitimasi dan reputasi pemerintah di mata publik;
- e) Membantu pemerintah dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Dalam konteks desa, manfaat transparansi sangat terasa dalam proses pembangunan partisipatif, di mana masyarakat ikut mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara aktif (Nurmandi & Maulani, 2020).

3. Dimensi / Indikator Transparansi

Dalam penelitian ini, transparansi diukur berdasarkan beberapa dimensi atau indikator, antara lain (Setyaningrum, 2017):

- a) Keterbukaan informasi: sejauh mana informasi tersebut tersedia dalam bentuk yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat;
- b) Kemudahan akses informasi; apakah informasi tersebut tersedia dalam bentuk yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat;
- c) Kejelasan laporan: Tingkat detail dan kejelasan dari dokumen-dokumen pelaporan;
- d) Frekuensi penyampaian informasi: seberapa rutin pemerintah desa menyampaikan laporan anggaran dan kegiatan;
- e) Partisipasi masyarakat: sejauh mana warga desa dilibatkan dalam forum atau musyawarah desa.

Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai apakah penerapan sistem informasi di desa telah menunjang keterbukaan atau belum.

4. Teori Pendukung

Teori transparansi sering dikaitkan dengan teori dengan teori *good governance* yang dikemukakan oleh *world bank* dan UNDP, yang menyebutkan bahwa transparansi merupakan salah satu dari enam pilar utama tata Kelola pemerintahan yang baik, Bersama dengan akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan supremasi hukum (UNDP, 2017).

Selain itu, teori akuntabilitas publik juga memperkuat pentingnya transparansi. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga publik harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan harus dapat menjelaskan keputusan dan Tindakan mereka kepada publik (Mulgan, 2000).

5. Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori dan konsep transparansi relevan dengan penelitian ini karena penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat. Dengan indikator transparansi yang jelas, dapat diukur apakah keberadaan SIPDD mampu menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang terbuka dan responsive terhadap kebutuhan publik, khususnya dalam pengelolaan dana dan pelayanan. Penelitian

ini juga ingi dibuktikan apakah sistem informasi benar-benar dapat menjadi katalisator transparansi di tingkat desa atau hanya bersifat administrative semata.

Tabel 2.1 Penellitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Variabel Sistem Informasi Dana Desa, Transparansi, Dan Pelayanan Publik.

No	Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Gap Penelitian	Link
1	Tri Hidayani (2025)	Dampak Kepemimpinan Digital Terhadap Implementasi Transformasi Digital	Peran Kepemimpinan Digital Dan Budaya Organisasi Terhadap Transformasi Digital Pemerintahan Desa.	Sistem Informasu Seperti Siskeudes Meningkatkan Transparansi Dan Pelayanan Publik	Belum Secara Spesifik Meneliti Dampak Sistem Informasi Pada Transparansi Dan Kepuasan Masyarakat Desa.	http://eprints.stiebankb.pdjateng.ac.id/3001/
2	MA Badali & I. Setiawan (2025)	Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pulantani	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Sistem Informasi	Keterbukaan Pelaporan Meningkatkan Kepercayaan Publik	Foukus Pada Transparansi, Belum Membahas Aspek Kepuasan Masyarakat Secara Kuantitatif	https://ejournal.stiaamunantai.ac.id/index.php/JKDPK/article/view/1185
3	Lestari Widiah Ningsih & Lingga Yuliana	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanolor	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan	Penyampaian informasi keuangan dinilai belum cukup rinci	Penyampaian informasi keuangan dinilai belum cukup rinci dan mudah	https://ejournal-nipamof.id/index.php/MASMAN/

	(2025)		Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	dan mudah dipahami, serta peran masyarakat masih terbatas.	dipahami, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program masih terbatas.	article/download/818/916/3972
4	Iin Kurnia, Wahyu & Yuanita (2025)	Analisis Pengaruh Transparansi Penerapan Aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan Desa) Terhadap Pelayanan Masyarakat Dalam pemanfaatan Dana Desa Yang Berdampak Pada Kepuasan Masyarakat.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat	Transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas informasi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga masyarakat puas	Kekhawatiran mengenai sejauh mana tingkat transparansi yang dapat dijamin oleh aplikasi ini dalam hal akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa	https://journal.admi.or.id/index.php/JAMAN/article/download/2250/2176/7091
5	Navid Fajriant, Jidan, Choirul & Icha Oktafia (2024)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	Peran aparatur desa dijalankan, tetapi juga prinsip <i>good governance</i> memengaruhi praktik transparansi pengelolaan Dana Desa.	Menegaskan bahwa transparansi efektif di level grassroots harus dipahami sebagai proses sosial yang membangun kepercayaan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak pengawasan serta kurangnya sosialisasi informasi publik.	https://e-journal.metrouniv.ac.id/tapis/article/view/11328/4854

				dan keterlibatan publik, bukan sekadar pembukaan data atau digitalisas		
6	Riyan Fardhany & Rizal Yahya (2024)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa	Agar Dana Desa saat ini yang sangat besar dapat dikelola dengan baik.	Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.	Adapun kepuasan masyarakat tidak dapat memediasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan keadilan pemerintah desa terhadap kepercayaan masyarakat desa	https://jurnal.admi.or.id/index.php/JAMAN/article/download/2250/2176/7091
7	Rizal Fadly, Lukman & Wawan (2024)	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Sudirman	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sudirman	Pengelolaan Alokasi Dana Desa akuntabel mulai dari tahap perencanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas.	Upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.	https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip/article/download/2954/650/
8	Sari, D. P. & Yulianti, T. (2020)	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa Terhadap	Siskeudes, Transparansi Dan Akuntabilitas	Siskeudes Meningkatkan Transparansi Dan	Belum Bahas Kepuasan Masyarakat	https://jurnal.unigal.ac.id/index1.php/jpak/ar

		Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.		ticle/view/3671
9	Ramadhani, N & Akbar, A. (2022)	Peran Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa	Sistem Informasi Dan Pelayanan Publik Desa	Sistem Informasi Mempercepat Pelayanan publik dan Meningkatkan Efisiensi Pelayanan di Desa	Tidak Mengkaji Transparansi	https://jurnal.unmuhsiber.ac.id/index.php/JIK/article/view/6740
10	Hutapea, R. & Sihombing, L. (2021)	Efektifitas Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	Siskeudes Efektif Membantu Pelaporan Keuangan Desa, Tapi Masih Terkendala Pemahaman.	Tidak Focus Pada Kepuasan Masyarakat	https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalilmuakuntansi/article/view/1205

b. Teori Kepuasan Masyarakat

1. Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Istilah ini mengacu pada penilaian masyarakat terhadap layanan yang mereka terima dari penyelenggara layanan public, terutama pemerintah. Penilaian tersebut

bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh harapan, pengalaman dan persepsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Menurut Kotler dan Keller (2009), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu produk atau layanan dengan harapan-harapannya. Apabila kinerja yang dirasakan melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas dan sebaliknya jika kinerja di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas.

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) mendefinisikan kepuasan sebagai respon emosional terhadap evaluasi pengalaman menggunakan suatu layanan. Kepuasan ini berhubungan erat dengan persepsi atas kualitas layanan serta apakah layanan tersebut memenuhi atau melampaui harapan.

Lupiyoadi (2014) menyatakan bahwa kepuasan merupakan hasil evaluasi setelah membandingkan antara harapan konsumen dengan kenyataan yang diterima. Dalam pelayanan publik, hal ini berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan pemerintah, termasuk dari aspek kecepatan, keterbukaan informasi, dan kemampuan aparatur.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan bentuk persepsi atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap layanan public berdasarkan sejauh mana harapan awal mereka terpenuhi. Apabila masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang sesuai atau lebih baik dari yang mereka harapkan, maka kepuasan akan tercipta.

2. Tujuan Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bukan hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depan. Tujuan pengukuran kepuasan masyarakat adalah:

- a. Mengevaluasi kualitas pelayanan publik dari perspektif penerima layanan (Masyarakat), sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelayanan yang diberikan;
- b. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan, baik dari segi prosedur, waktu, sikap petugas, maupun sarana pendukung;
- c. Mendorong instansi pemerintah untuk lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
- d. Membangun kepercayaan public terhadap institusi pemerintah, khususnya di tingkat desa;
- e. Memberikan dasar untuk pengambilan kebijakan perbaikan layanan, berdasarkan bukti empiris dari hasil survei kepuasan. (Sumber: Kementerian PAN-RB, 2017).

3. Indikator Kepuasan Masyarakat

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 menetapkan Sembilan unsur pelayanan publik yang menjadi indikator dalam mengukur kepuasan masyarakat:

- a. Persyaratan pelayanan: kejelasan dan kemudian persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat dalam mengakses layanan;
- b. Prosedur pelayanan: kemudahan dalam mengikuti tahapan pelayanan, dari awal hingga akhir;
- c. Waktu pelayanan: kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar waktu yang ditetapkan;
- d. Biaya pelayanan: kewajaran, keterbukaan dan transparansi biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat;
- e. Produk spesialis layanan: kesamaan antara jenis layanan yang dijanjikan dan yang diterima oleh masyarakat;
- f. Kompensasi pelaksanaan: kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan secara profesional;
- g. Perilaku pelaksanaan: kesopanan, keramahan, serta empati petugas dalam melayani masyarakat;
- h. Sarana dan prasarana: ketersediaan dan kenyamanan fasilitas pelayanan publik;
- i. Penanganan pengaduan: responsi instansi terhadap keluhan, masukan dan saran dari masyarakat.

Indikator ini digunakan sebagai dasar penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang wajib dilakukan secara berkala oleh penyelenggara pelayanan publik.

4. Pendekatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Dalam literatur pelayanan public dan pemasaran jasa, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengatur kepuasan masyarakat:

a. *Disconfirmation Paradigm*

Pendekatan ini menyatakan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh perbandingan antara harapan awal dan kenyataan yang dirasakan.

b. *SERVQUAL (Service Quality Model)*

Diperkenalkan oleh Parasuraman et al. model ini mengatur lima dimensi kualitas layanan:

- 1) *Tangibles* (Bukti fisik);
- 2) *Reliability* (Keandalan layanan);
- 3) *Responsiveness* (daya tanggap petugas);
- 4) *Assurance* (jaminan dan rasa aman);
- 5) *Empathy* (perhatian personal)

c. *Customer Satisfaction Index (CSI)*

Pendekatan kuantitatif yang menggabungkan hasil dari beberapa indikator layanan menjadi satu nilai indeks yang mewakili tingkat kepuasan secara keseluruhan.

5. Kepuasan Masyarakat dan pelayanan Publik Desa

Dalam konteks desa, kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas. Masyarakat yang merasa puas terhadap layanan desa akan lebih berpartisipasi aktif dalam

pembangunan, pengawasan, serta mendukung keberlanjutan program-program desa.

Penerapan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa seperti Siskeudes menjadi instrument penting dalam menciptakan layanan yang transparan, cepat, dan terukur, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Apabila layanan desa dapat diakses dengan mudah, informasi keuangan dibuka secara transparan, dan keluhan masyarakat ditindaklanjuti dengan baik, maka masyarakat cenderung akan menilai positif pelayanan pemerintah desa tersebut.

c. Teori Sistem Informasi Publik

1. Pengertian Sistem Informasi Publik

Sistem informasi Publik merupakan bagaian dari pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Sistem ini dirancang agar instansi pemerintahan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Dalam konteks pelayanan public, sistem informasi ini memiliki peran penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan.

Menurut Laudon (2016), sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan

teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen dalam suatu organisasi. Dalam sistem informasi publik, teknologi digunakan untuk mengelola data yang relevan dengan pelayanan publik dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem, di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung fungsi manjerial organisasi dengan kegiatan strategi, dan menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu.

O'Brien & Marakas (2010), sistem informasi public adalah sistem yang menyajikan data dan informasi dari institusi public kepada masyarakat luas dengan menggunakan teknologi onformas dan komunikasi yang memfasilitasi partisipasi public dan transparansi.

Indrajit (2002), sistem informasi public merupakan bagian dari e-government yang mungkin terjadinya hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan akses informasi berbasis teknologi.

Kosasih (2015), menyatakan bahwa sistem informasi public memiliki karakteristik terbuka, mudah diakses, cepat, dan akurat, serta menjadi alat control public terhadap kinerja pemerintah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi public adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi publik adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, akurat, dan mudah diakses, guna mendorong transparansi, efisiensi pelayanan, serta partisipasi publik. Dalam konteks pemerintahan desa, sistem ini mendukung keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dan mendorong kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Publik

Sistem informasi public memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan public yang modern dan responsif. Tujuan tersebut antara lain:

- a) Menyediakan informasi yang akurat dan real-time kepada masyarakat terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan;
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan public;
- c) Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui informasi public, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebutuhan informasi public;
- d) Mempercepat proses pelayanan dan pengambilan keputusan di instansi pemerintah;

- e) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah.

Secara fungsional, sistem informasi public memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sistem ini juga berfungsi sebagai media control sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, proyek, dan pelayanan public.

3. Karakteristik Siste, Informasi Publik

Agar dapat berfungsi secara optimal, sistem informasi public idealnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Aksesibilitas : sistem harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan teknis atau administratif;
- b) Transparansi: informasi yang disampaikan harus terbuka, tidak direkayasa, dan lengkap;
- c) Real -time: data dan informasi yang tersedia harus diperbarui secara berkala dan dapat diakses kapan saja;
- d) Interaktif: sistem meberikan ruang partisipasi masyarakat, seperti fitur pengaduan, saran dan feedback;
- e) Integrasi: terhubung dengan sistem lainnya di lingkup pemerintahan, baik horisontal (antar instansi maupun vertikal (pusat – pusat desa).

4. Penerapan Sistem Informasi Publik di Pemerintahan Desa

Salah satu contoh nyata penerapan sistem informasi public di tingkat desa adalah aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam:

- a) Menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes);
- b) Mencatat transaksi keuangan desa secara digital;
- c) Mempublikasikan realisasi dana desa kepada masyarakat.

Melalui sistem ini, masyarakat desa dapat memantau alokasi dan realisasi penggunaan dana desa, yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan informasi. Dengan sistem informasi keuangan seperti Sikeudes, pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran.

5. Relevansi dengan Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi public merupakan faktor penting yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa dan berdampak terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public. Keberadaan sistem masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa dan mengurangi potensi penyimpangan.

Sistem informasi public tidak hanya sekedar alat dokumentasi atau pelaporan, melainkan juga instrument strategis untuk mendorong

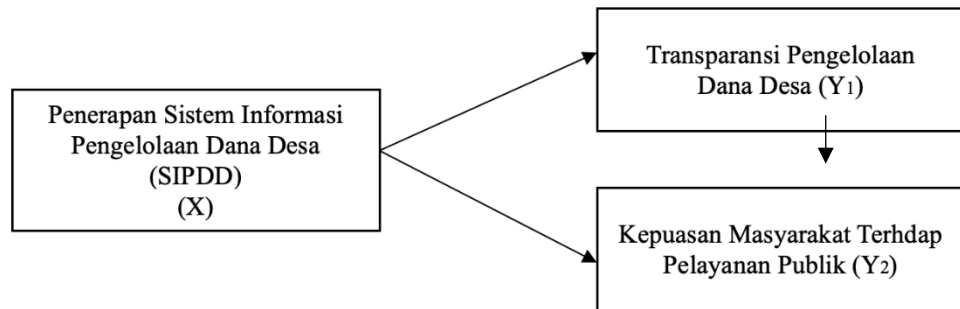
pelayanan public yang partisipatif, transparan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Gap Penelitian	Link
1	Arifin & Rachmawati (2023)	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Hubungan sistem informasi dengan transparansi dana desa	Penerapan Siskeudes meningkatkan keterbukaan laporan keuangan	Tidak mengevaluasi persepsi masyarakat	https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jki/article/view/7783
2	Permana & Ningsih (2022)	Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Desa	Pemanfaatan teknologi untuk laporan keuangan desa	Transparansi meningkat melalui media daring anggaran desa	Belum mengukur dampaknya terhadap kepuasan warga	https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/52498
3	Rahmatullah & Nabila (2023)	Website Desa sebagai Instrumen Transparansi Pengelolaan Dana	Website desa untuk laporan realisasi dana	Masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana lebih efektif	Belum menilai aspek kepuasan atau kepercayaan masyarakat	https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/asset/article/view/6014

4	Fitriana & Yuliana (2021)	Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Kepuasan Masyarakat	Pelayanan publik desa berbasis teknologi informasi	Layanan berbasis digital berpengaruh signifikan terhadap kepuasan	Tidak fokus pada sistem keuangan desa	https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jurnal_ekonomi/article/view/11745
5	Parisca et al. (2025)	Platform Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Pada Kantor Desa Helvetia	Sistem pengaduan berbasis web untuk pelayanan desa	Peningkatan kepuasan melalui akuntabilitas dan transparansi	Belum mengukur dampak pada aspek keuangan desa	https://jurnal.polgen.ac.id/index.php/jmp/article/view/15065
6	Panjaitan & Yuniarti (2023)	Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web di Desa Tanjung Rejo	Aplikasi pengelolaan dana desa secara digital	Meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran	Belum membahas persepsi atau kepuasan masyarakat	https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jtikom/article/view/5787
7	Sari et al. (2023)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa melalui Media Digital	Media digital dalam publikasi keuangan desa	Warga lebih tahu alur dana, memperkuat kepercayaan	Belum meneliti kepuasan masyarakat secara langsung	https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/42567

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Hubungan antar variable dalam penelitian ini ddapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) (X1) dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X2).

Semakin baik penerapan SIPDD, maka proses pencatatan, pelaporan, dan penyampaian informasi keuangan desa akan semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga tingkat transparansi pengelolaan dana desa meningkat.

2. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) (X1) dengan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Y).

Penerapan SIPDD membantu aparatur desa bekerja lebih tertib, cepat, dan jelas dalam memberikan layanan, sehingga masyarakat menilai pelayanan publik lebih baik dan merasa lebih puas.

3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X2) dengan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Y).

Semakin transparan pemerintah desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi dana desa, semakin tinggi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi.

H2 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Desa Bulumargi.

H3 Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Desa Bulumargi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*).

Penelitian kuantitatif eksplanatori digunakan karena peneliti ingin menjelaskan pengaruh antara variable bebas dan variable terikat, yaitu:

1. Pengaruh penerapan Sistem Inforamasi pengelolaan Dana Desa (SIPDD) (X1) terhadap
2. Transparansi peneglolaan dana desa (X2) dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public (Y) di Desa Bulumargi.

Data yang dikumpulkan berupa angka (skor kuesioner) dan dianalisis dengan statistic untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bulumargi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan Desa Bulumargi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan:

1. Desa Bulumargi telah menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa.

2. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh SIPDD terhadap transparansi dan kepuasan masyarakat di desa tersebut.
3. Lokasi desa relatif mudah dijangkau oleh peneliti sehingga mendukung kelancaran pengumpulan data.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai dari kegiatan penyusunan proposal, pengurusan izin penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan data di lapangan, pengolahan serta analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Secara lebih rinci, jadwal pelaksanaan penelitian selama enam bulan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel jadwal atau timeline penelitian pada table 3.2.2.

Tabel 3.2.2 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	Bulan VI
1	Penyusunan proposal penelitian	✓					
2	Pengurusan izin penelitian	✓	✓				
3	Penyusunan dan uji coba instrumen penelitian		✓	✓			
4	Pengumpulan data di lapangan			✓	✓		
5	Pengolahan dan analisis data				✓	✓	
6	Penyusunan dan					✓	✓

	penyempurnaan laporan akhir						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.2.2 Populasi

Menurut Sugiono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bulumargi yang:

1. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dan
2. Pernah berinteraksi dengan pelayanan publik desa dan/atau mengetahui adanya program dana desa.

Berdasarkan data dari Desa Bulumargi tahun 2025, jumlah penduduk yang memenuhi kriteria tersebut sebanyak 89 orang ($N= 89$), yang sekaligus menjadi populasi dalam penelitian ini.

3.2.3 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang sudah diketahui, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat kesalahan (*error tolerance*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% ($e = 0,10$). Dengan jumlah populasi $N = 89$ orang, maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{89}{1 + 89 (0,10)} = \frac{89}{1 + 89} = \frac{89}{1 + 0,89} = \frac{89}{1,89} \approx 47,08$$

(0,01)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dibulatkan menjadi 47 (empat puluh tujuh) responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana dari warga yang memenuhi kriteria populasi. Setiap anggota populasi yang berjumlah 89 orang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, kemudian dipilih 47 orang secara acak untuk dijadikan sampel penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Desa Bulumargi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti profil desam data jumlah penduduk, laporan APBDes, laporan realisasi dana desa dan dokumen lain yang relevan.

Tenik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.3.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian, menggunakan skala Likert 5 poin, dengan pilihan jawaban:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Ragu-ragu (R)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Kuesioner dibagikan langsung (tatap muka) kepada responden terpilih di Desa Bulumargi, kemudian dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut.

3.3.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti:

1. Data profil dan monografi Desa Bulumargi
2. Data jumlah penduduk
3. Data APBDes dan realisasi dana desa
4. Foto kegiatan pelayanan publik dan pembangunan
5. Dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap variabel yang diteliti, berikut disajikan definisi operasional setiap variabel serta indikatornya:

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti.

1. Variabel X1: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD)

Definisi operasional: tingkat pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi (aplikasi) dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi, yang mencakup aspek penggunaan sistem, kemudahan, ketepatan, dan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Variabel Y₁: Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Definisi operasional: tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat, meliputi akses informasi, kejelasan laporan, frekuensi penyampaian, dan pelibatan warga.

3. Variabel Y₂: Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Definisi operasional: penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik di Desa Bulumargi, dilihat dari kesesuaian antara harapan dan pelayanan yang diterima, berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik.

3.4.1 Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik variabel bebas maupun variabel terikat, maka disusun tabel operasional variabel yang memuat definisi operasional, indikator, butir pernyataan kuesioner, serta skala pengukuran yang digunakan.

Tabel 3.4.1 Defisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Utama	Nomor Butir Kuesioner	Skala
Penerapan SIPDD (X1)	Tingkat penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan aplikasi/sistem- Kerapian & kemudahan dokumentasi- Kecepatan & ketepatan pelaporan- Pemanfaatan untuk pelayanan ke warga- Intensitas penggunaan sistem	X11 s.d. X110	Likert 1–5
Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X2)	Keterbukaan informasi pemerintah desa terkait dana desa kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian informasi dana desa- Ketersediaan & kemudahan akses informasi- Kejelasan isi informasi/laporan	X2 s.d. X22	Likert 1–5

		<ul style="list-style-type: none"> - Kerutinan penyampaian informasi - Pelibatan dan partisipasi masyarakat 		
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Y)	Penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik desa dibandingkan harapan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan pelayanan - Prosedur pelayanan - Waktu pelayanan - Biaya pelayanan - Produk layanan - Kompetensi & perilaku aparat - Sarana & prasarana - Penanganan pengaduan - Kepuasan keseluruhan 	Y.1 s.d. Y.12	Likert 1–5

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Skor jawaban responden kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai masing-masing variabel.

Sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan pada sejumlah responden dalam skala kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi. Hasil uji coba digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur konsep yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan skor masing-masing butir dengan skor total variabel menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson.

Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi 0,05. Butir yang tidak memenuhi kriteria validitas dapat diperbaiki atau dihilangkan dari instrumen.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal instrumen, yaitu apakah instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan beberapa kali pada kondisi yang relatif sama. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha \geq 0,60 (atau standar yang ditetapkan dalam penelitian). Semakin mendekati angka 1,00, maka reliabilitas instrumen semakin baik.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Pengolahan Data

Tahap awal pengolahan data meliputi:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi jawaban.
2. *Coding*, yaitu memberikan kode angka pada setiap alternatif jawaban responden sesuai skala yang digunakan.
3. *Tabulating*, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis.

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan:

1. Karakteristik responden (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal).
2. Gambaran umum masing-masing variabel (X_1 , Y_1 , Y_2) melalui perhitungan nilai rata-rata (*mean*), persentase, dan kategori tingkat (misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi).

3.6.3 Uji Prasyarat Analisis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu:

1. Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov–Smirnov atau Shapiro–Wilk. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$.

2. Uji Linearitas

Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Hubungan dikatakan linear apabila nilai signifikansi pada uji linearitas memenuhi kriteria yang ditetapkan (misalnya Sig. < 0,05 pada linearity dan Sig. > 0,05 pada deviation from linearity).

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier.

Hipotesis yang diuji antara lain:

3.7.1 H_1 : Penerapan SIPDD (X_1) berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa (Y_1).

3.7.2 H_2 : Penerapan SIPDD (X_1) berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Y_2).

3.7.3 H_3 : Transparansi pengelolaan dana desa (Y_1) berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Y_2).

Secara umum, model regresi linier sederhana dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + e$$

Keterangan:

1. Y = variabel terikat (Y_1 atau Y_2)
2. X_1 = variabel bebas (X_1 atau Y_1)
3. a = konstanta
4. b = koefisien regresi
5. e = galat (error)

Pengujian dilakukan dengan uji t. Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (artinya terdapat pengaruh yang signifikan).
2. Jika nilai Sig. \geq 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan).

Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) juga dilihat untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum objek atau lokasi penelitian merupakan rincian umum yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian. Pada bagian gambaran umum ini, peneliti menguraikan secara singkat dan jelas gambaran umum Desa Bulumargi sebagai tempat penelitian.

4.1.1 Profil Desa Bulumargi

Setiap daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda sehingga menjadikan cerminan karakter dan pencirian khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dari kisah ataupun dongeng-dongeng yang diwariskan turun temurun melalui lisan orang tua sehingga terkadang sulit dibuktikan secara nyata. Akan tetapi masyarakat tetap selalu memegang teguh budaya adat maupun cerita yang telah diwariskan pendahulu mereka baik bapak, nenek, kakek dan mbah-mbah mereka. Tidak jarang awal mula dari terbentuknya suatu daerah merupakan keadaan alam yang dijumpai saat awal ditemukannya daerah tersebut untuk dijadikan permukiman. Hal itu juga merupakan keadaan yang menjadikan identitas dari Desa Bulumargi.

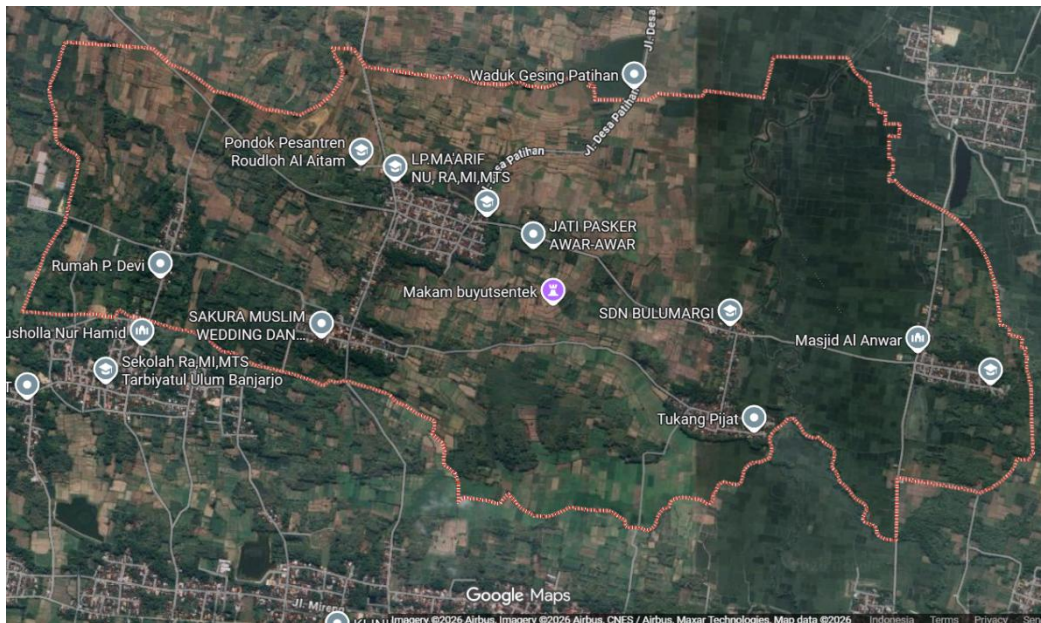
Awal mula terbentuknya desa Bulumargi merupakan desa yang terbentuk dari zaman kolonial Belanda dan belum ada perubahan atau pemekaran sehingga rasa kekeluargaan disetiap warganya masih terpelihara

dengan baik.

Pada Desa Bulumargi hamparan sawah, tambak dan perkebunan yang mengitari wilayah Desa Bulumargi ini menjadi pemandangan yang tidak bisa terelakkan oleh mata siapa saja yang melihatnya. Di Desa ini masih banyak hamparan sawah yang luas, suasana Desa Bulumargi ini masih sejuk dan asri. Ditambah lagi dengan pemandangan waduk yang berada di bagian utara Desa.

Data peta Desa Bulumargi dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2
Peta Desa Bulumargi



Sumber : Data Geografis Desa Bulumargi

Desa Bulumargi terletak sekitar 8,5 KM sebelah timur dari pusat kota Kecamatan Babat dengan jumlah penduduk sebanyak 3.268 Jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sehingga tidak salah bila dalam desa ini terdapat sekitar 5 (lima) kelompok tani dengan

klasifikasi tingkat lanjut (menurut data UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Babat). Desa ini memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) 950 dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Bulumargi

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1866
2	Prempuan	1762
Total		3268

Sumber : Data Monografi Desa Bulumargi

Dilihat dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Desa Bulumargi memiliki total penduduk 3268 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1866 dan jumlah penduduk perempuan 1762 jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, selain itu juga bekerja diluar negri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Selain itu juga ada yang bekerja di bidang wiraswasta, pegawai negeri, guru, pedagang dan peternak. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa Bulumargi tentu dapat menjadi modal berharga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Seperti pada masyarakat desa pada umumnya, masyarakat Desa Bulumargi hidup secara sosial. Penduduknya berinteraksi antara satu dengan yang lain.

4.1.2 Gambaran Penerapan SIPDD di Desa Bulumargi

Desa Bulumargi telah menerapkan sistem informasi pengelolaan dana desa (SIPDD) atau sistem sejenis (misalnya aplikasi keuangan desa) untuk mendukung penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan. Uraian pada subbab ini dapat mencakup: (1) waktu mulai penerapan sistem, (2) operator/pengelola sistem, (3) bentuk pelaporan dan publikasi informasi kepada masyarakat (papan informasi, website/medsos desa, musyawarah desa), serta (4) kendala dan dukungan yang dihadapi dalam implementasi.

4.2 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini kuesioner atau angket dengan memberikan kuesioner tersebut kepada 47 responden sesuai sampel yang diambil. Berikut merupakan data penelitian yang disajikan akan mendeskriptifkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai nilai variabel penelitian. Analisis deskriptif ditunjukkan melalui data presentase dengan program SPSS ver. 17, seperti pada tabel-tabel dibawah ini:

4.2.1 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada masyarakat Desa Bulumargi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki – Laki	28	59.6	59.6	59.6
	Perempuan	19	40.4	40.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebanyak 47 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang atau 59,6% dan responden perempuan sebanyak 19 orang atau 40,4%.

4.2.2 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis umur.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada masyarakat Desa Bulumargi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Karakterisitik Berdasarkan Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Umur 17 – 25	12	20.5	20.5	25.5
	Umur 26 - 35	20	42.6	42.6	68.1
	Umur 36 - 45	10	21.3	21.3	89.4
	46 tahun keatas	5	10.6	10.6	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah responden yang berumur 26>35 tahun yaitu sebanyak 20 orang, dilanjutkan dengan responden berumur 17>25 tahun (25,5%) sebanyak 12 orang, 20 responden berumur 26>35 (42,6%), kemudian responden berumur 36>45 (21,3%) sebanyak 10 orang, dan responden berumur 46 keatas (10,6%) sebanyak 5 orang. Jadi berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak pada penelitian ini adalah didominasi oleh responden yang berumur 26>35 tahun.

4.2.3 Karakteristik responden Berdasarkan Jenis pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada masyarakat Desa Bulumargi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negri	16	34.0	34.0	34.0
	Swasta	29	61.7	61.7	38.3
	Pengusaha	2	4.3	4.3	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.4 diatas pekerjaan oleh responden berdasarkan data dari 47 responden, sebanyak 16 orang bekerja sebagai PNS (34,0%),

sedangkan (4,3%) atau sebanyak 2 orang pengusaha, dan sebanyak 29 orang dari pekerja swasta (61,7%). Jadi, responden terbanyak berdasarkan jenis pekerjaan adalah responden dari pekerja swasta yaitu dengan jumlah 29 orang (61,7%).

4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Deskriptif variabel Penerapan SIPDD (X1), Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X2) dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Y) dari 47 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	MaX1imu m	Mean	Std. Deviation
Penerapan	47	25	35	30.94	29.959
Transparansi	47	25	35	30.17	25.73
Kepuasan	47	25	35	30.30	2.661
Valid N (listwise)	47		100.0	100.0	

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 4.5 diatas menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variabel penilaian. Berdasarkan tabel 4.5 tersebut hasil analisis menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel penerapan (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 35 dan mean sebesar 30,94 dengan standar deviasi sebesar 2,959, kemudian untuk variabel Transparansi (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 35 dan mean sebesar 30,17 dengan standar deviasi sebesar 2,573, sedangkan untuk variabel

kepuasan (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 35 dan mean sebesar 30,30 dengan standar deviasi sebesar 2,661.

4.3.1 Deskripsi Variabel Penerapan SIPDD (X1)

Analisis deskriptif terhadap variabel penerapan SIPDD (X1) terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan berdasarkan pernyataan responden mengenai variabel tersebut. Analisis pernyataan variabel penerapan SIPDD (X1) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jawaban responden terhadap pernyataan terkait variabel Penerapan

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1.	Saya mengetahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulumargi sudah menggunakan sistem/aplikasi berbasis komputer	23 49%	20 42,5%	4 8,5%	0 0%	0 0%	47 100%
2.	Petugas desa terlihat menggunakan komputer/aplikasi ketika mengelola keuangan desa	19 40,4%	21 44,7%	7 14,9%	0 0%	0 0%	47 100%
3.	Informasi kegiatan yang dibiayai dana desa tersusun rapi dan terdokumentasi dengan baik	16 34,1%	22 46,8%	9 19,1%	0 0%	0 0%	47 100%
4.	Sistem informasi pengelolaan dana desa membuat proses pelaporan keuangan desa menjadi	29 61,7%	16 34,1%	2 4,2%	0 0%	0 0%	47 100%

	lebih cepat						
5.	Sejak adanya sistem informasi, kesalahan dalam informasi terkait dana desa jarang terjadi	28 59,6%	19 40,4%	0 0%	0 0%	0 0%	47 100%
6.	Sistem informasi pengelolaan dana desa membantu aparat desa menjawab pertanyaan warga mengenai dana desa.	26 55,3%	17 36,2%	4 8,5%	0 0%	0 0%	47 100%
7.	Informasi dana desa dapat diakses melalui media digital (website, media sosial, aplikasi, dan sejenisnya).	24 51,1%	22 46,8%	1 2,1%	0 0%	0 0%	47 100%

Sumber : Data diolah 2025

Dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Pertanyaan 1, mayoritas responden sebanyak 23 orang (49%) menyatakan sangat setuju bahwa saya tau pengelolaan dana Desa Bulumargi menggunakan sistem/aplikasi berbasis komputer.
- b. Pertanyaan 2, mayoritas responden sebanyak 21 orang (44,7%) menyatakan setuju melihat petugas Desa Bulumargi menggunakan komputer/aplikasi saat mengelola keuangan desa.
- c. Pertanyaan 3, mayoritas responden sebanyak 22 orang (46,8%) menyatakan setuju bahwa Informasi kegiatan yang dibiayai dana desa tersusun rapi dan terdokumentasi dengan baik.

- d. Pertanyaan 4, mayoritas responden sebanyak 29 orang (61,7%) menyatakan sangat setuju bahwa Sistem informasi pengelolaan dana desa membuat proses pelaporan keuangan desa menjadi lebih cepat.
- e. Pertanyaan 5, mayoritas responden sebanyak 28 orang (59,6%) menyatakan sangat setuju bahwa Sejak adanya sistem informasi, kesalahan dalam informasi terkait dana desa jarang terjadi.
- f. Pertanyaan 6, mayoritas responden sebanyak 26 orang (55,3%) menyatakan sangat setuju bahwa Sistem informasi pengelolaan dana desa membantu aparat desa menjawab pertanyaan warga mengenai dana desa.
- g. Pertanyaan 7, mayoritas responden sebanyak 24 orang (51,1%) menyatakan sangat setuju bahwa Informasi dana desa dapat diakses melalui media digital.

4.3.2 Deskripsi Variabel Transparansi (X2)

Analisis deskriptif terhadap variabel Transparansi (X2) terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan berdasarkan pernyataan responden mengenai variabel tersebut. Analisis pernyataan variabel Transparansi (X2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jawaban responden terhadap pernyataan terkait variabel
Transparansi

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1.	PemDes menyampaikan informasi tentang jumlah dana desa yang diterima setiap tahun	24 51,1%	22 46,8%	1 2,1%	0 0%	0 0%	47 100%

2.	PemDes menyampaikan informasi tentang kegiatan apa saja yang dibiayai dari dana desa.	16 34,1%	26 55,3%	5 10,6%	0 0%	0 0%	47 100%
3.	Informasi tentang dana desa dapat dilihat masyarakat (misalnya di balai desa, papan informasi, website, atau media lainnya).	13 27,7%	29 61,7%	5 10,6%	0 0%	0 0%	47 100%
4.	Saya mudah mendapatkan informasi tentang dana desa ketika membutuhkannya.	17 36,2%	29 61,7%	1 2,1%	0 0%	0 0%	47 100%
5.	Bahasa yang digunakan dalam laporan atau pengumuman dana desa mudah saya pahami.	28 59,6%	19 40,4%	0 0%	0 0%	0 0%	47 100%
6.	Rincian penggunaan dana desa (jenis kegiatan dan besar anggaran) disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.	26 55,3%	17 36,2%	4 8,5%	0 0%	0 0%	47 100%
7.	PemDes rutin menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada masyarakat (misalnya melalui musyawarah desa atau pertemuan warga).	24 51,1%	22 46,8%	1 2,1%	0 0%	0 0%	47 100%

Sumber : Data diolah 2025

Dari tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Pertanyaan 1, mayoritas responden sebanyak 24 orang (51,1%) menyatakan sangat setuju bahwa PemDes menyampaikan informasi

tentang jumlah dana desa yang diterima setiap tahun.

- b. Pertanyaan 2, mayoritas responden sebanyak 26 orang (55,3%) menyatakan setuju bahwa PemBes menyampaikan informasi tentang kegiatan apa saja yang dibiayai dari dana desa.
- c. Pertanyaan 3, mayoritas responden sebanyak 29 orang (61,7%) menyatakan setuju bahwa Informasi tentang dana desa dapat dilihat masyarakat (misalnya di balai desa, papan informasi, website, atau media lainnya).
- d. Pertanyaan 4, mayoritas responden sebanyak 29 orang (61,7%) menyatakan setuju bahwa Saya mudah mendapatkan informasi tentang dana desa ketika membutuhkannya.
- e. Pertanyaan 5, mayoritas responden sebanyak 34 orang (72,4%) menyatakan setuju bahwa bahasa yang digunakan dalam laporan atau pengumuman dana desa mudah saya pahami.
- f. Pertanyaan 6, mayoritas responden sebanyak 25 orang (53,2%) menyatakan sangat setuju bahwa Rincian penggunaan dana desa (jenis kegiatan dan besar anggaran) disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
- g. Pertanyaan 7, mayoritas responden sebanyak 25 orang (53,2%) menyatakan sangat setuju bahwa rutin menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada masyarakat (misalnya melalui musyawarah desa atau pertemuan warga).

4.3.3 Deskripsi Variabel Kepuasan (Y)

Analisis deskriptif terhadap variabel Kepuasan (X2) terdiri dari 7 item pernyataan akan dilakukan berdasarkan pernyataan responden mengenai variabel tersebut. Analisis pernyataan variabel Kepuasan (X2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Jawaban responden terhadap pernyataan terkait variabel Kepuasan

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1.	Persyaratan pelayanan di kantor desa jelas dan mudah dipahami.	13 27,7%	25 53,1%	9 19,1%	0 0%	0 0%	47 100%
2.	Prosedur pelayanan di kantor desa sederhana dan tidak berbelit-belit.	17 36,2%	24 51,1%	6 12,7%	0 0%	0 0%	47 100%
3.	Waktu penyelesaian pelayanan di kantor desa sudah sesuai dengan yang dijanjikan.	21 44,7%	24 51,1%	2 4,2%	0 0%	0 0%	47 100%
4.	Biaya pelayanan (jika ada) diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.	21 44,7%	25 53,2%	1 2,1%	0 0%	0 0%	47 100%
5.	Saya merasa biaya pelayanan di kantor desa wajar dan tidak memberatkan.	20 42,5%	24 51,1%	3 6,4%	0 0%	0 0%	47 100%
6.	Produk layanan yang saya terima (misalnya surat, dokumen, atau layanan lainnya) sesuai dengan	20 42,5%	25 53,2%	2 4,3%	0 0%	0 0%	47 100%

	yang saya butuhkan.						
7.	Aparat desa memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	22 46,8%	22 46,8%	3 6,4%	0 0%	0 0%	47 100%

Sumber : Data diolah 2025

Dari tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Pertanyaan 1, mayoritas responden sebanyak 25 orang (53,1%) menyatakan setuju bahwa persyaratan pelayanan di kantor desa jelas dan mudah dipahami.
- b. Pertanyaan 2, mayoritas responden sebanyak 24 orang (51,1%) menyatakan setuju bahwa prosedur pelayanan di kantor desa sederhana dan tidak berbelit-belit.
- c. Pertanyaan 3, mayoritas responden sebanyak 24 orang (51,1%) menyatakan setuju bahwa waktu penyelesaian pelayanan di kantor desa sudah sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Pertanyaan 4, mayoritas responden sebanyak 25 orang (53,2%) menyatakan setuju bahwa Biaya pelayanan (jika ada) diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- e. Pertanyaan 5, mayoritas responden sebanyak 24 orang (51,1%) menyatakan setuju bahwa saya merasa biaya pelayanan di kantor desa wajar dan tidak memberatkan.
- f. Pertanyaan 6, mayoritas responden sebanyak 25 orang (53,2%) menyatakan setuju bahwa produk layanan yang saya terima (misalnya

surat, dokumen, atau layanan lainnya) sesuai dengan yang saya butuhkan.

g. Pertanyaan 7, mayoritas responden sebanyak 22 orang (46,8%) menyatakan sangat setuju bahwa petugas desa memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.4 Uji Prasyarat Analisis Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas ini berkaitan dengan presisi instrumen. Penting untuk menguji hubungan antara skor setiap item pertanyaan dan skor kuesioner keseluruhan untuk menentukan apakah kuesioner yang telah dibuat itu sah atau tidak, artinya bahwasanya uji validitas disini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5%. Dimana nilai r tabel dengan $N=47$ pada signifikansi 5% pada distribusi nilai r tabel maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,288. Berikut hasil dari uji validitas dari masing-masing variabel.

a. Uji Validitas Variabel Penerapan (X1)

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan (X1)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,785	0,288	Valid
X1.2	0,674	0,288	Valid
X1.3	0,605	0,288	Valid
X1.4	0,655	0,288	Valid
X1.5	0,604	0,288	Valid
X1.6	0,701	0,288	Valid

X1.7	0,732	0,288	Valid
------	-------	-------	-------

Sumber : Data diolah 2025

Hasil pengujian validitas pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Penerapan (X1) dalam hal ini semua pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel (0,288) pada signifikan 5%.

b. Uji Validitas Variabel Transparansi (X2)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X2)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,760	0,288	Valid
X2.2	0,671	0,288	Valid
X2.3	0,684	0,288	Valid
X2.4	0,619	0,288	Valid
X2.5	0,647	0,288	Valid
X2.6	0,308	0,288	Valid
X2.7	0,644	0,288	Valid

Sumber : Data diolah 2025

Hasil pengujian validitas pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel Transparansi (X2) dalam hal ini semua pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel (0,288) pada signifikan 5%.

c. Uji Validitas Variabel Kepuasan (Y)

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan (Y)

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
-----------------	----------	---------	------------

Y.1	0,760	0,288	Valid
Y.2	0,671	0,288	Valid
Y.3	0,684	0,288	Valid
Y.4	0,619	0,288	Valid
Y.5	0,647	0,288	Valid
Y.6	0,308	0,288	Valid
Y.7	0,644	0,288	Valid

Sumber : Data diolah 2025

Hasil pengujian validitas pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel kepuasan masyarakat (Y) dalam hal ini semua pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel (0,288) pada signifikan 5%.

4.4.2 Uji Realibilitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji realibilitas cronbach alpha menurut wiratna Sujerweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha $>$ 0,6.

a. Uji Reabilitas Variabel Penerapan (X1)

Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penerapan (X1)
Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,800	7

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha (a)* sebesar 0,800 dari semua variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel disiplin kerja yaitu dinyatakan reliabel atau handal sebagai alat ukur variabel.

b. Uji Reabilitas Variabel Transparansi (X2)

Tabel 4.13
Hasil Uji Reabilitas Variabel Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,751	7

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha (a)* sebesar 0,751 dari semua variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel motivasi kerja yaitu dinyatakan reliabel atau handal sebagai alat ukur variabel.

c. Uji Reabilitas Variabel Kepuasan (Y)

Tabel 4.14
Hasil Uji Reabilitas Variabel Kepuasan (Y)

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,736	7

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha (a)* sebesar 0,736 dari semua variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kepuasan masyarakat yaitu dinyatakan reliabel atau handal sebagai alat ukur variabel.

4.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai Signifikansi $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai Signifikansi $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas

One-3ample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N		47
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std.	1,89941573
Deviation		
	Absolute	,071
Most EX1treme		,058
	Positive	-,071
Differences		,487
	Negative	,972
Kolmogorov-Smirnov Z		
Asymp. Sig. (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal

b. Calculatoted from data

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,972 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual tiga variabel tersebut berdistribusi normal.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independent. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independent (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan metode *Tolerance* dimana jika nilai *Tolerance* lebih besar dari $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas, dan VIF (*Variance Inflation Factor*) jika nilai VIF lebih kecil dari $< 10,00$ maka artinya

tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	8,319	3,508		2,372	,022		
1	Penerapan	,445	,132	,495	3,380	,002	,540	1,851
	Transparansi	,272	,151	,263	1,798	,079	,540	1,851

a. Dependent Variable: Kepuasan
Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan model regresi pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan masyarakat tidak terjadi gejala multikolinieritas artinya model regresi tersebut baik yang membuktikan adanya hubungan yang kuat antar variabel independent hal ini dijelaskan pada tabel diatas dimana nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk disiplin kerja dan motivasi kerja sebesar $1,851 < 10,00$.

4.5.2 Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan dimana jika nilai Sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas, sedangkan jika nilai Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedasitas. Dengan begitu asumsi yang baik dalam model

regresi yaitu tidak terjadi heteroskedasitas.

Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedasitas
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
(Constant)	-3,816	1,873		-2,037	,048
1 Penerapan	,003	,070	-,008	,044	,965
Transparansi	-174	,081	-,403	2,150	,067

a. *Dependent Variable: RES2*

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan model regresi diatas dimana nilai signifikansi variabel disiplin kerja $0,965 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel motivasi kerja $0,067 > 0,05$, yang artinya tidak terjadi heteroskedasitas karena asumsi yang baik dalam model regresi yaitu tidak terjadi heteroskedasitas.

4.6 Hasil Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linier)

4.6.1 Uji Analisis linier berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih antara variabel independet (X) terhadap variabel dependent (Y). Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten, jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik.

Tabel 4.18
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
(Constant)	8,319	3,508		2,372	,022
1 Penerapan	,445	,132	,495	3,380	,002
Transparansi	,272	,151	,263	1,798	,079

a. *Dependent Variable: Kepuasan*
Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai a) sebesar 9,326 dan untuk penetapan sebesar 0,445 dan transparansi sebesar 0,272. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8,319 + 0,445 X_1 + 0,272 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kepuasan

X₁: Penerapan

X₂: Transparansi

- a. Nilai konstanta kepuasan masyarakat sebesar 8,319 yang menyatakan jika variabel X₁, X₂ dan Y sama dengan nol yaitu Penerapan dan Transparansi maka Kepuasan masyarakat adalah sebesar 8,319.
- b. Koefisien X₁ sebesar 0,445 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X₁ sebesar 1% maka kepuasan masyarakat meningkat sebesar 0,445 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X₁ sebesar 1% maka kepuasan masyarakat akan menurun sebesar 0,445

- c. Koefisien X_2 sebesar 0,272 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_2 (motivasi kerja) sebesar 1% maka kepuasan masyarakat meningkat sebesar 0,272 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_1 sebesar 1% maka kepuasan masyarakat akan menurun sebesar 0,272

4.6.2 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan pada uji t dimana jika nilai sig. $< 0,05$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai sig. $> 0,05$, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

$$t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05; 2) = (47-2-1) \\ = (0,025; 44)$$

$$t_{tabel} = 2,015$$

Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,380 > t_{tabel} 2,015$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh, artinya variabel Penerapan berpengaruh terhadap Kepuasan masyarakat (Y). Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,079 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,798 < t_{tabel} 2,015$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh transparansi (X_2) terhadap kepuasan masyarakat (Y).

4.6.3 Uji F

Dasar pengambilan keputusan pada uji t dimana jika nilai sig. $< 0,05$,

atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai $sig. > 0,05$, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y.

$$F_{tabel} = F(k ; n-k) = F(2 ; 47-2)$$

$$= 2 : 45$$

$$F_{tabel} = 3,23$$

Tabel 4.19

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159,872	2	79,936	21,193	,000 ^b
	Residual	165,958	44	3,772		
	Total	325,830	46			

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Penerapan (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $21,193 > F_{tabel}$ 3,23, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

4.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 4.20
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,700 ^a	,491	,468	1,94210

a. Predictors: (Constant), Transparansi (X2), Penerapan (X1)

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,491, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 49,1%. Sedangkan sisanya 50,9% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) dan Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan masyarakat pada Desa Bulumargi dengan jumlah sampel sebanyak 47 responden. Apakah dengan adanya Penerapan SIPDD maupun Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kepuasan masyarakat atau tidak adanya pengaruh dalam pengumpulan data penelitian, Kuesioner atau angket menjadi pilihan penelitian dan program aplikasi SPSS versi 21 digunakan untuk mengelolah data tersebut, kemudian penelitian akan menganalisis lagi data yang dijadikan sebagai hasil akhir dari penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian akhirnya peneliti mendapat jawaban bahwa terdapat pengaruh penerapan SIPDD terhadap kepuasan masyarakat namun tidak terdapat pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepuasan

masyarakat pada Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa (SIPDD) terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bulumargi.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, mengenai apakah ada pengaruh penerapan SIPDD terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi, Hasil rumus regresi berganda yaitu $Y = 8,319 + 0,445 X_1 + 0,272 X_2 + e$ dimana jika koefisien X_1 sebesar 0,445 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_1 sebesar 1% maka Y meningkat sebesar 0,445 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_1 sebesar 1% maka Kepuasan Masyarakat akan menurun sebesar 0,445. Hal ini menggambarkan ketika penerapan SIPDD baik maka kepuasan masyarakat juga akan naik.

Hasil penelitian ini adalah nilai koefisien regresi dari disiplin kerja sebesar 0,445, dengan nilai sig. sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung 3,380 $> t$ tabel 2,015. Jadi berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel penerapan SIPDD berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bulumargi

Berdasarkan rumusan masalah kedua, mengenai apakah ada pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi. Hasil rumus regresi berganda yaitu $Y = 8,319 + 0,445 X_1 + 0,272 X_2 + e$ dimana jika koefisien X_2 sebesar 0,272 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X_2 (Transparansi) sebesar 1%

maka Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi meningkat sebesar 0,272 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel X_1 sebesar 1% maka Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi akan menurun sebesar 0,272. Hal ini menggambarkan jika transparansi pengelolaan dana desa baik maka Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi akan naik.

Hasil penelitian ini adalah nilai koefisien dari transparansi pengelolaan dana desa sebesar 0,272, dengan nilai t hitung $1,798 < t$ tabel 2,015, dan nilai signifikansi sebesar $0,079 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

3. Pengaruh Secara Simultan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bulumargi

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, mengenai apakah ada pengaruh secara simultan penerapan SIPDD dan Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi. Hasil penelitian ini adalah nilai signifikansi untuk pengaruh penerapan SIPDD dan Transparansi secara simultan terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $21,193 > F$ tabel 3,23, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh Penerapan SIPDD dan Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Bulumargi. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SIPDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan masyarakat Desa Bulumargi.
2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Desa Bulumargi.
3. Penerapan SIPDD dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Desa Bulumargi.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis: Temuan penelitian memperkuat kajian administrasi publik terkait penerapan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan desa. Apabila pengaruh signifikan ditemukan, SIPDD dapat diposisikan sebagai instrumen yang mendukung prinsip transparansi (*good governance*) dan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola data dan pelaporan.

Implikasi Praktis: Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi bagi Pemerintah Desa Bulumargi untuk meningkatkan pemanfaatan SIPDD dan

mekanisme publikasi informasi kepada masyarakat, serta perbaikan mutu layanan berdasarkan dimensi kepuasan yang paling rendah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Bulumargi:
 - a. Meningkatkan publikasi informasi APBDes dan realisasi dana desa secara rutin melalui media yang mudah diakses (papan informasi, website/medsos desa, dan forum musyawarah
 - b. Memperkuat kapasitas operator/perangkat desa melalui pelatihan berkala
 - c. Mengintegrasikan output SIPDD dengan layanan *front office* agar manfaat sistem dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Desa Bulumargi: meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah desa dan mekanisme pengawasan, serta memanfaatkan kanal informasi/pengaduan yang disediakan desa.
3. Bagi Instansi Pembina (Dinas PMD/BPKP/pendamping desa): menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan, termasuk dukungan infrastruktur, standar publikasi informasi, dan supervisi pelaporan agar implementasi sistem berjalan konsisten.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: memperluas variabel dan metode (misalnya menambahkan variabel kepercayaan publik atau kualitas layanan / *SERVQUAL*, atau menggunakan pendekatan *miX1-method*) agar mampu menangkap dinamika implementasi sistem informasi dan dampaknya secara

lebih komprehensif.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dapat dituliskan sesuai kondisi lapangan, misalnya: keterbatasan jumlah responden ($n=47$), keterbatasan waktu pengumpulan data, serta keterbatasan akses data sekunder tertentu. Keterbatasan ini perlu dicantumkan sebagai catatan untuk interpretasi hasil dan pengembangan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, E. (2005). *Integrity, transparency and accountability in public administration*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Fitriana, L., Harahap, R. F., & Lestari, S. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jakp.v12i1.1234>
- Handayani, D., & Hidayat, R. (2021). Pelayanan Publik di Desa: Antara Kepuasan dan Kinerja Aparatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 88–95.
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better governance?* (pp. 3–23). Oxford University Press.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Andi.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Dana Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian PAN-RB. (2017). *Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Kosasih, D. (2015). *Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (14th ed.). Pearson.

- Lupiyoadi, R. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maulana, A., & Suryanto, W. (2020). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 101–113. <https://doi.org/10.21009/jip.082.06>
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Nurmandi, A., & Maulani, S. (2020). Transparansi dan Partisipasi dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.21009/jip.091.04>
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: The Free Press.
- Prasetyo, A. D., & Nugroho, R. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Keterbukaan Informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 67–74.
- Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 34–46. <https://doi.org/10.31289/jakp.v8i2.115>
- Susanto, H., & Wahyuni, T. (2022). Evaluasi Implementasi SIPDD dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 5(1), 23–34.
- UNDP. (2017). *Transparency, Accountability and Anti-Corruption Measures in Public Administration*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme. (2017). *Transparency, accountability and anti-corruption measures in public administration*. New York: UNDP.